

Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di kabupaten Kutai Timur

Noor Saima Hartini^{1✉}, Syarifah Hidayah², Diana Lestari³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk munguji kembali dan menganalisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Kabupaten Kutai Timur. Penelitian dilakukan menggunakan analisis regresi berganda terhadap data Kabupaten Kutai Timur selama periode 2016-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan koefisiensi regresi sebesar 19,229. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1% maka nilai belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 19,229. Dengan asumsi semua variabel independen tetap. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan koefisiensi regresi sebesar -0,212. Hali ini menunjukkan setiap kenaikan 1% maka nilai belanja daerah akan mengalami penurunan sebesar -0,212. Dengan asumsi semua variabel independen tetap. Variabel Dana Bagi hasil (DBH) menunjukkan koefisiensi regresi sebesar 0,240. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1% maka nilai belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,240. Dengan asumsi semua variabel independen tetap. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan koefisiensi regresi sebesar 4,032. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1% maka nilai belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 4,113. Dengan asumsi semua variabel independen tetap.

Kata kunci: Dana alokasi umum; dana alokasi khusus; dana bagi hasil; pendapatan hasil daerah; belanja daerah

Factors affecting regional spending the East Kutai regency

Abstract

This study is intended to re-examine and analyze the factors that affect regional spending in East Kutai Regency. The study was conducted using multiple regression analysis of East Kutai Regency data during the 2016-2021 period. The results showed that the variable General Allocation Fund (DAU) showed regression coefficient of 19.229. This shows that every increase of 1%, the value of regional spending will increase by 19.229. Assuming all independent variables are fixed. Variable special Allocation Fund (DAK) shows regression coefficient of -0.212. This Hali shows that every 1% increase in the value of regional spending will decrease by -0.212. Assuming all independent variables are fixed. Variable revenue sharing (DBH) showed regression coefficient of 0.240. This shows that every increase of 1%, the value of regional spending will increase by 0.240. Assuming all independent variables are fixed. Regional revenue variables (PAD) showed regression coefficient of 4.032. This shows that every increase of 1%, the value of regional spending will increase by 4.113. Assuming all independent variables remain.

Key words: *General allocation fund; special allocation fund; revenue sharing fund; regional revenue; regional expenditure*

PENDAHULUAN

Pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 dimana pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pelaksanaan desentralisasi. Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) semestinya bersifat pendukung bagi kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat yang Masih besar mengidentifikasi bahwa Daerah tersebut masih belum dikatakan mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Merupakan Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus untuk membantu membiayai daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Selain itu dana yang bersumber dari Alokasi Umum dan Khusus ada juga dana bagi hasil dimana tertulis dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjelaskan Dana Bagi Hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oates dalam Halim (2002) memberikan pengertian flypaper effect adalah respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa di Kabupaten Kutai Timur memiliki Dana Alokasi Umum yang berada pada keuangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 sebesar Rp.571.773.275,- yang dimana penggunaan dana lebih banyak digunakan untuk membantu peningkatan kualitas publik daerah dan penguatan Sumber Daya Manusia, dari penggunaan DAU + 25% digunakan untuk membantu sumber-sumber ekonomi yang yang terdampak Covid-19, dari penggunaan DAU bersifat asimetris yang berarti berdasarkan hasil kinerja maka akan langsung mendukung dan mengoptimalkan penggunaan DAU untuk output-output layanan yang langsung berdampak di Masyarakat. Dari penggunaan DAU tersebut sangat minim untuk infrastruktur karena DAU Masih Diharapkan untuk pemulihan ekonomi khususnya sektor-sektor mikro tetapi Masih sangat minim untuk pengembangan sektor Infrastruktur. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Sedangkan Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan)

Sedangkan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 penggunaan Dana sebesar Rp.235.430.713. yang dimana dana tersebut lebih dominan pada penggunaan DAK Fisik Reguler yaitu sebesar Rp.130.029.240. Sedangkan yang paling sedikit adalah penggunaan untuk reguler transportasi perdesaan dimana dana yang digunakan sebesar Rp.4.700.000,-. Untuk penggunaan dana untuk kesehatan dan Keluarga Berencana Masih sangat minim yaitu sebesar Rp.30.449.868,- dan penggunaan dana Pendidikan sebesar Rp.20.164.289,-. Pada pengalokasian DBH sebesar Rp. 1.129.406.676,- yang dimana penyerapan lebih banyak bersumber dari pembagian hasil pajak yang dimana paling dominan dari sektor pajak Pertambangan dan sisanya oleh sektor - sektor yang lain, sedangkan untuk PAD sebesar Rp. 158.318.483, dimana terbagi menjadi empat sumber seperti Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.82.233.795.000,- , Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 4.945.568.000,- dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.258.795.576,- & Lain-lain Yang Sah sebesar Rp. 66.880.362.000,-.

Dari Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Timur bersumber dari pajak. Dari ke empat sumber dana tersebut digunakan untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur. Dari Ke empat sumber dana memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya berperan sebagai penyeimbang fiskal pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dari pajak yang telah di dapatkan. DAU yang didapat berperan sebagai pemerata fiskal antardaerah (fiscal equalization) , DAK berperan sebagai dana yang digunakan untuk kepentingan darurat, DBH berguna untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dan PAD di manfaatkan untuk memberikan kewenangan

kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dapat menggunakan dana tersebut dengan efektif dan efisien sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi pemerintahan. Pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat adalah dana yang paling di harapkan dan ditunggu dikarenakan porsi yang besar untuk diberikan kepada pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sebagai bentuk operasi pembiayaan utamanya yaitu Belanja Daerah akan tetapi di karenakan keadaan Pandemi Covid-19 yang terjadi dan tidak dapat dihindarkan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menggunakan dana lebih 25% untuk mengatasi keadaan tersebut sehingga terjadi permasalahan pada kemungkinan adanya flypaper effect yang terjadi dalam belanja daerah yang dimana di transfer Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Timur. Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Kutai Timur.

METODE

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian Analisis faktor-faktor seperti Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah ini dilaksanakan di Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahapan selanjutnya dari penelitian Analisis dan Evaluasi Dampak Alokasi DAU, DAK , DBH dan PAD adalah menganalisis hasil, manfaat, dan dampak dari pengalokasian DAU, DAK , DBH dan PAD terhadap daerah selama periode tahun tahun 2017- 2021. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan kuantitatif, yaitu permodelan ekonometrika untuk menelaah dampak DAU, DAK , DBH dan PAD secara makro.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan dua variabel, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen/terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Sedangkan untuk Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) (X1) , Dana Alokasi Khusus (DAK) (X2), Dana Bagi Hasil (DBH) (X3) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X4) adapun untuk lebih jelasnya dengan uraian sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum (DAU)

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (DAU Kabupaten = 90% x 25% x PDN (Pendapatan Dalam Negeri) x Bobot DAU) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penghitungan DAK dalam PP No 55 Tahun 2005 melalui dua tahapan yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK (kriteria umum, khusus, dan teknis) dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah (perhitungan indeks kriteria umum, khusus, dan teknis). Setiap daerah yang menerima DAK, wajib mengalokasikan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran DAK yang diterimanya.

DAK = Dana Pendamping x 10%

Kriteria umum merupakan kemampuan keuangan daerah yang dapat dihitung melalui indeks fiskal netto. Kriteria khusus merupakan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah yang dihitung melalui indeks kewilayahan. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

Belanja Daerah

Belanja Daerah dapat dilihat dari DAK Fisik dimana didalamnya terdapat penggunaan alokasi dana seperti pembuatan jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan pemukiman, dan irigasi

Flypaper effect

Flypaper effect adalah peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan dan Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung dengan menggunakan rumus :

$DBH = \text{Dana Bagi Hasil Pajak} + \text{Dana Bagi Hasil Bukan Pajak}$

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 11, terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. PAD dapat diukur dengan perhitungan:

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS$$

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Dari Laba Pendapatan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS).

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat Model umum yang digunakan untuk menganalisa dampak langsung dari DAU dan DAK, DBH dan PAD terhadap Belanja Daerah pada setiap bidang dan setiap tahun adalah:

$$BD = \alpha + \beta_1DAK + \beta_2DAU + \beta_3DBH + \beta_4PAD + e$$

Dimana:

BD	: Indikator Belanja Daerah
DAK	: Alokasi DAK disuatu bidang di suatu daerah
DAU	: Alokasi DAU disuatu bidang di suatu daerah
DBH	: Alokasi DBH disuatu bidang di suatu daerah
PAD	: Alokasi PAD di suatu bidang di suatu daerah
α	: Konstanta
$\beta_1;\beta_2;\beta_3;\beta_4$: Nilai Koefisien
e	: term error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing–masing variabel independen. Koefisien diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan regresi:

Tabel 1.

Model	Hasil Uji Regresi Linear Berganda					
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-720.660	.971	.310		
	DAU	19.229	2.566	.010	.112	9.264
	DAK	-.212	2.601	-.080	.276	4.240
	DBH	.240	3.355	.021	.811	1.233
	PAD	4.113	2.211	.018	.221	4.221

a. Dependent Variable: DB

Dari tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,566 dan t tabel sebesar 2,015 dengan nilai signifikan 0,010 dimana nilai signifikan < 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini H1 diterima.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,601 dan t tabel sebesar 2,015 dengan nilai signifikan -0,080 dimana nilai signifikan < 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini H2 diterima.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah, halini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,355 dan t tabel sebesar 2,015 dengan nilai signifikan 0,021 dimana nilai signifikan < 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini H3 diterima.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,211 dan t tabel sebesar 2,015 dengan nilai signifikan 0,018 dimana nilai signifikan < 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini H4 diterima.

Menentukan Flypaper effect

Untuk menentukan apakah terjadi flypaper effect, maka efek PAD terhadap BD dibandingkan dengan efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek DAK terhadap BD. Syarat terjadinya flypaper effect adalah (1) apabila efek (nilai koefisien) DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau (2) PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect.

Berdasarkan tabel hasil uji parsial dapat dilihat nilai koefisien PAD adalah 4,113, nilai koefisien DAU adalah 19,229 dan nilai koefisien DAK adalah -0,212. Jika dijumlahkan koefisien DAU dan DAK maka akan menghasilkan nilai koefisien $19,229 + (-0,212) = 19,017$. Nilai koefisien DAU dan DAK ini lebih besar daripada nilai koefisien PAD ($19,017 > 4,113$), maka dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu dalam tahun 2016 - 2021 telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah kabupaten Kutai Timur.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil uji t yang dilakukan, nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,010 lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha=0,05$. Sehingga, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan

daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang sering disebut dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sehingga ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi dapat diatasi.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil uji t yang dilakukan, nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar -0,080 lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha=0,05$. Sehingga, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah. Dana perimbangan berupa DAK berasal dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih (Unun Dian Anggraeni, dan Suhardjo (2013)). Setiap daerah mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan setiap daerah memiliki kriteria yang berbeda-beda dan kriteria setiap daerah merupakan faktor besar atau kecilnya suatu daerah mendapatkan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat

Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil uji t yang dilakukan, nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,021 lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha=0,05$. Sehingga, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH, sehingga semakin besar Dana Bagi

Hasil (DBH) maka kewajiban pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dan menyejahterakan masyarakatnya akan dapat terealisasikan dan dalam proses merealisasikannya pasti dianggarkan melalui belanja daerah oleh karena itu semakin besar Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh pemerintah daerah akan semakin besar pula belanja daerah untuk memenuhi segala kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Unun Dian Anggraeni, dan Suhardjo (2013) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil uji t yang dilakukan, nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.018 lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha=0.05$. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Hal ini berarti semakin tinggi Pendaatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai suatu kemandirian daerah dan tolak ukur untuk keberhasilan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang berasal dari sumber – sumber kekayaan dalam wilayah daerah itu sendiri yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada variabel X1 yaitu Dana Alokasi Umum memiliki angka signifikan sebesar nilai t hitung sebesar 2,566 dan t tabel sebesar 2,015, kemudian nilai koefisien sebesar 19,229, artinya jika Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka dapat meningkatkan belanja daerah sebesar 19,229 juta rupiah. maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Kondisi ini

memperlihatkan apabila pemasukan dari DAU semakin besar atau mengalami peningkatan maka hal ini juga akan mempengaruhi peningkatan dan pengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada variabel X2 yaitu Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t hitung sebesar 2,601 dan t tabel sebesar 2,015, kemudian nilai koefisien sebesar -0,212, artinya jika Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka dapat menurunkan belanja daerah sebesar -0,212 juta rupiah. maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Kondisi ini memperlihatkan apabila pemasukan dari DAK semakin besar atau mengalami peningkatan maka hal ini juga akan mempengaruhi penurunan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada variabel X3 yaitu Dana Bagi Hasil memiliki nilai t hitung sebesar 3,355 dan t tabel sebesar 2,015, kemudian nilai koefisien sebesar 0,240, artinya jika Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka dapat menurunkan belanja daerah sebesar 0,240 juta rupiah. maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Kondisi ini memperlihatkan apabila pemasukan dari DBH semakin besar atau mengalami peningkatan maka hal ini juga akan mempengaruhi kenaikan terhadap belanja daerah

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada variabel X4 yaitu Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t hitung sebesar 2,211 dan t tabel sebesar 2,015, kemudian nilai koefisien sebesar 4,113, artinya jika Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka dapat menurunkan belanja daerah sebesar 4,113 juta rupiah. maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Kondisi ini memperlihatkan apabila pemasukan dari DAK semakin besar atau mengalami peningkatan maka hal ini juga akan mempengaruhi kenaikan terhadap belanja daerah.

Dari analisa yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa variabel X1 Dana Alokasi Umum (DAU), variabel X2 Dana Alokasi Khusus (DAK), variabel X3 Dana Bagi Hasil (DBH), variabel X4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel Y Belanja Daerah (BD) Kabupaten Kutai Timur secara simultan atau bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur. Hal ini dilihat dari nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar 2054.60 dan F tabel 0,193 atau $2054.60 > 0,193$.

Pengujian secara parsial membuktikan bahwa terjadi flypapaer effect pada belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atau berdasakan hasil ini pemerintah daerah terbukti lebih banyak menggunakan Dana Alokasi Umum ataupun Dana Alokasi Khusus untuk kepentingan Belanja Daerah daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizawati 2012. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten di Sumatera Selatan. *Journal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*. Vol 2 No 1.
- Bratakusumah, Deddy Supriadi. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Deni. 2014. Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2003-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Vol. 12 No. 2.
- Ndadari, Oktavia, Laras Wulandan Adi, PriyoHari. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS* Surabaya.
- Sukirno, Sadono. 2006. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suparmoko. 2010. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Suryana. 2001. Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarigan, Robinson. 2004. Ekonomi Regional: Teori & Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 1, No. 2, (2016)
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Kurnia Eka Daddy dan Candra Fajri Ananda. 2013. Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Di Pulau Sumatra. *Journal Simposium Nasional Akuntansi*.